

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan juga tidak berorientasi pada laba, salah satu dari jenis organisasi sektor publik adalah instansi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang berbentuk pemerintahan dalam suatu negara terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (V. Wiratna, 2015:2-5). Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal (Abdul Halim, 2010:90). Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan wujud dalam rangka pemerintah daerah yang harus terus melakukan strategi agar dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, karena pengelolaan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, system informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Dadang Suwanda, dkk, 2017:1).

Pengukuran sistem akuntansi keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang

publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif, akuntabilitas juga mempunyai fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana dan anggaran publik oleh suatu institusi (Yulaikah, 2014). Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara dipusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pengendalian intern merupakan bagian pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu system manajemen berbasis kinerja, pengendalian intern juga berperan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga asset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan, pengendalian intern membantu manajemen instalasi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang digunakan melalui pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif (Rahmadi Murwanto 2012:195).

Pengendalian intern merupakan bagian pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-

prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja, pengendalian intern juga berperan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga asset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan, pengendalian intern membantu manajemen instalasi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang digunakan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif (Rahmadi Murwanto 2012:195).

Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang (Jonny M. Situmorang, 2016). Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik seringkali terjadinya berbagai korupsi, dan kualitas laporan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utama lemahnya sistem pengendalian internal (Mahmudi,2016).

Fenomena yang terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah yaitu terdapat 2.357 PNS terkait kasus korupsi akibat para anggota yang kurangnya tanggung jawab terhadap pengendalian pemerintah daerah tersebut (Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan, 2018). Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah (Risma Aprianti,2017).

Sistem Pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan, pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas bagi keputusan ekonomi sosial maupun politik (Deddi, 2011:41). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pengelolaan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip (Dewi Andini, 2015). Informasi dalam laporan keuangan banyak digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna mengambil suatu keputusan (Kadek Desiana Wati, 2014). Namun pada kenyataannya pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporan keuangannya. Dikatakan lebih lanjut, penilaian itu didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (Harry Azhar Aziz, 2014). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah (Dadang Suwanda, 2015).

Fenomena yang terkait dengan Sistem Pelaporan Keuangan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak pernah berhenti mengusut kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) [Bank Century](#) dan penetapan Bank Century, KPK juga masih menemukan beberapa salah saji dalam pelaporan keuangan pemerintah tahun 2017 (Juru Bicara KPK Febri Diansyah, 2018). Sistem Pelaporan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah dimana jika semakin baik system

pelaporan keuangan, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan begitu pun jika sebaliknya, terkait dengan system pelaporan yaitu masih terbatasnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi dalam hal pencatatan laporan arus kas pada pendapatan masih secara semi manual terkadang masih ada kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencapaian (Muhamad Hasanudin, 2018).

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh system pengendalian internal pemerintah Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat tindakan korupsi yang kurangnya tanggung jawab dari pengendalian internal pemerintah dalam akuntabilitas kinerja
2. KPK juga masih menemukan beberapa salah saji dalam pelaporan keuangan pemerintah tahun 2017.
3. Akuntabilitas kinerja yang menurun karena pelaporan keuangan yang belum sesuai.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah didapat, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh system pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Seberapa besar pengaruh system pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah agar peneliti memperoleh dan dapat mengumpulkan data dan informasi untuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui system pengendalian internal pemerintah dan system pelaporan keuangan,

1.4.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh system pengendalian intern pemerintah dan system pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

1.5.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Memberikan referensi tentang keterkaitan antara system pengendalian intern pemerintah dan system pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

b. Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama.

c. Bagi Peneliti

Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dengan system pengendalian intern pemerintah dan system pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.